



Manajemen Pemerintahan Desa Sukaluyu Dalam Produktivitas Bumdes Jaya Perkasa

Sukaluyu Village Government Management In The Productivity Of Jaya Perkasa Bumdes

Nandira Maharani^{1*}, Evi Priyanti²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*E-mail: : nandira.rani@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga keuangan yang dikembangkan pemerintah sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Berdasarkan potensi khusus desa tersebut, dengan itu pemerintah desa dan masyarakat memutuskan untuk membangun BUMDes. BUMDes harus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun dan mensejahterakan desanya. Bagi pemerintah desa BUMDes dapat menjadi sebuah tempat untuk membangun dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki desa. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana manajemen pemerintahan desa untuk meningkatkan produktivitas BUMDes di Desa Sukaluyu dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini mengadopsi Metode Kualitatif. Untuk mengamati dan menganalisis fenomena- fenomena manajemen pemerintahan Desa, metode kualitatif dianggap lebih relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen memang bisa menjadi salah satu tolak ukur sebuah lembaga bisa dikatakan produktif atau tidaknya, bagaimana BUMDes menjalankan tugas dan fungsinya dalam perencanaan hingga pengawasan yang diharapkan bisa menjalankan dan meningkatkan roda perekonomian desa dan masyarakat.

Kata Kunci: *Manajemen, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).*

Abstract

Village Owned Enterprises (BUMDes) are financial institutions developed by the government as a means of improving community welfare through the Community Empowerment and Village Development Agency. Based on the village's special potential, the village government and the community decided to build BUMDes. BUMDes must encourage community involvement in developing and prospering their village. For the village government, BUMDes can be a place to build and utilize the resources and potential of the village. The purpose of this study was to find out how far the management of village government has increased the productivity of BUMDes in Sukaluyu Village in planning, organizing, implementing and supervising. This research adopts the Qualitative Method. To observe and analyze village government management phenomena, qualitative methods are considered more relevant. The results of this study indicate that the management function can indeed be one of the benchmarks for an institution to be said to be productive or not, how BUMDes carry out their duties and functions from planning to oversight. It is hoped that it can run and improve the wheels of the village and community economy.

Keywords: *Management, Village Government, Village-Owned Enterprises.*

Cara citasi : Maharani, Nandira,. Priyanti, Evi. (2023). Manajemen Pemerintahan Desa Sukaluyu Dalam Produktivitas Bumdes Jaya Perkasa. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 4 No 1 Maret 2023, 40-49.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah entitas pemerintahan terkecil, terendah, pertama, dan terdekat dengan masyarakat Sejalan dengan itu, Larasati dan Muhammad Okto dalam (Suprajo, 2019) berpendapat bahwa peningkatan suatu bangsa tergantung pada desanya karena tanpa provinsi yang maju, suatu bangsa sulit untuk maju, dan tanpa kabupaten atau kota yang maju, desa atau kelurahan juga tidak mungkin maju. Artinya, kemajuan desa menjadi tonggak kemajuan suatu negara. Pelaksanaan pembangunan menentukan kemajuan suatu desa. Pembangunan desa dikehendaki untuk memajukan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara memenuhi keperluan dasar, mengoptimalkan sarana dan prasarana, ekspansi ekonomi lokal dan memastikan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan (Suprajo, 2019).

Undang-undang tersebut juga mengesahkan bahwa Kepala desa harus memiliki lima belas (15) hak untuk mengatur masyarakat. Lima dari lima belas kewenangan tersebut yaitu mengelola keuangan desa dan *real estate*, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, mengoptimalkan dan meningkatkan ekonomi desa, dan mengintegrasikannya di dalam desa berkaitan dengan keuangan desa. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya, desa mengembangkan ekonomi skala produktif untuk sumber daya alam dan menerima pelimpahan serta mengusulkan separuh kekayaan negara guna memajukan kesejahteraan mengusulkan (Senjani, 2019).

Aparatur Desa yang sering disebut dengan pemerintahan desa sangat penting untuk menjaga berjalannya roda pemerintahan di tingkat lokal. Kepala desa dan perangkat desa lainnya termasuk kedalam pemerintahan desa. Seperti halnya Staff yang membantu kepala desa menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan berada di sekretariat desa, dan unsur-unsur yang membantu tanggung jawab Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan disimpan dalam aliran pelaksana teknis dan elemen daerah. Hal itu termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015. Kepala desa sangat penting untuk pembangunan desa karena berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan sebagai bentuk perpanjangan tangan negara yang menyatu dengan masyarakat. Kepala desa juga memiliki kekuasaan untuk mengawasi kegiatan ekonomi desa. Kepala desa menggunakan Badan usaha yang dikenal dengan istilah

BUMDes untuk mengikutsertakan masyarakat dalam membina usaha ekonomi rakyat (Kurniawan, Setiawan, & Listiani, 2020).

Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, pemerintah menciptakan sebuah badan keuangan yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang fungsi utamanya adalah menawarkan pinjaman kredit terhadap masyarakat yang menginginkan pinjaman tersebut, agar bisa melaksanakan bidang usahanya. Selain itu, BUMDes sendiri dapat mendirikan unit-unit usaha demi meningkatkan perekonomian masyarakat (Asvi, 2017).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembangunan daerah tertinggal, tujuan pembangunan BUMDes ialah demi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan transmigrasi sejalan dengan tujuan tersebut. Berdasarkan potensi khusus desa tersebut, pemerintah desa dan prakarsa masyarakat desa memutuskan untuk mendirikan BUMDes. Dengan sumber daya lokal, dengan kata lain sumber daya alam dan sumber daya manusia, potensi tersebut dapat terwujud. Akibatnya, pembentukan BUMDes bukan merupakan kebutuhan pemerintah pusat, sebaliknya merupakan gagasan pemerintah Desa dan masyarakat Desa guna meningkatkan kesejahteraan mereka (Senjani, 2019).

Di tingkat lokal, BUMDes dimaksudkan untuk mendinamisasikan seluruh potensi desa untuk kepentingan masyarakatnya. BUMDes harus mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun dan mensejahterakan desanya. Karena BUMDes bisa menjadi penampung bagi pemerintah Desa untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang terdapat di desa. Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk berkembang melahirkan masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Subaidi, Muchsin, & Khoiron, 2019).

Pembentukan BUMDes juga didasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan bahwa “Desa dapat menegakkan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) menyebutkan bahwa “berjalannya BUMDesa harus dengan dorongan kekeluargaan dan gotong royong,” dan ayat (3) menyebutkan bahwa “BUMDesa diizinkan untuk melakukan usaha dibidang ekonomi dan/atau memberikan pelayanan umum seimbang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Subaidi, Muchsin, & Khoiron, 2019).

Kecamatan Teluk Jambe Timur terdiri dari 9 desa, yang salah satu nya yaitu desa sukaluyu. Desa sukaluyu sendiri memiliki jumlah penduduk 19.750 jiwa, jumlah

masyarakat yang cukup besar tersebut maka kualitas kesejahteraan ekonomi perlu diperhatikan. Desa Sukaluyu sendiri memiliki BUMDes yang bernama Jaya Perkasa, usaha yang terdapat di BUMDes Jaya Perkasa yaitu berbagai produk UMKM masyarakat desa. Tetapi, pada tahun 2019 BUMDes Jaya Perkasa mengalami kebangkrutan sehingga tidak ada anggaran belanja desa Sukaluyu yang dialokasikan kepada BUMDes. Pada tahun 2020 dipilihlah direktur BUMDes Jaya Perkasa yang baru yang diharapkan BUMDes dapat berkembang dan menjalin kerjasama dengan perusahaan di kawasan industri. Dan ditahun 2022 BUMDes Jaya Perkasa kembali bangkit dengan membuka galeri UMKM Desa Sukaluyu yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Pengaturan BUMDes ini menyertakan beberapa faksi terutama mengenai masyarakat lokal dan pemerintah desa, untuk mengoptimalkan produktifitas BUMDes di Desa Sukaluyu maka perlu manajemen pemerintahan desa yang tertata dalam pengelolaan produktivitas BUMDes.

Untuk itu manajemen pemerintahan desa dalam produktivitas BUMDes Jaya Perkasa dalam topik studi ini, klasifikasi fungsi manajemen George R.Terry ke dalam empat kategori, yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait manajemen Pemerintah Desa Sukaluyu dalam produktivitas BUMDes Jaya Perkasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. (Sugiyono, 2015) mendefinisikan metode kualitatif sebagai penelitian di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, penggabungan digunakan sebagai metode pengumpulan data, dan analisis data bersifat induktif.

Untuk mencari data dan informasi melalui informan atau individu yang terkait dengan masalah penelitian, teknik pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Baik data sekunder maupun data primer digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh dari sumber luar atau diperoleh secara informal dengan media perantara. Data sekunder yang peneliti dapatkan melalui sumber berita online mengenai BUMDes Jaya Perkasa. Sedangkan data primer merupakan sumber informasi kajian yang peneliti peroleh langsung dari pengumpul data. Interaksi langsung dengan perangkat desa dan direktur

BUMDes digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebagian besar data mereka melalui observasi dan wawancara.

Analisis data merujuk pada Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015), dengan melihat tindakan pengorganisasian data ke dalam acuan, kategori, dan deskripsi dasar memungkinkan identifikasi tema beserta perumusan hipotesis kerja yang didukung oleh data. Menurut pendapat Miles, dari tiga aliran aktivitas bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

Kantor Desa Sukaluyu menjadi tempat penelitian untuk penelitian ini. Pada penelitian ini, dan kantor BUMDes yang bersebelahan dengan kantor Desa karena lokasi ini memiliki hal yang menarik untuk diteliti.

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Diharapkan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Mendasar Desa Sukaluyu Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes Jaya Perkasa

Perencanaan adalah proses mempertimbangkan dan memutuskan dengan hati-hati segala sesuatu yang harus dilakukan di masa depan untuk menggapai haluan yang telah diputuskan sebelumnya. Menurut George R. Terry dalam (Hasibuan, 2010) perencanaan juga menyangkut gerakan pengambilan keputusan, perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi perencanaan, yang selanjutnya akan dibahas dalam setiap elemen perencanaan (planning) (Susanti, Syairozi, & Yunifa, 2021).

Merencanakan atau merumuskan rencana adalah hasil dari pengambilan keputusan di antara kemungkinan dengan mempertimbangkan keadaan saat ini. Membuat keputusan adalah tahap pertama dalam perencanaan, dan topik ini tercakup dalam sub-indikator perencanaan. Berdasarkan bagaimana perencanaan dilakukan dan bagaimana pengambilan keputusan akan dilakukan, menentukan keputusan sangat penting untuk merancang bagaimana perencanaan hendak dilakukan. Membuat keputusan membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor yang akan mempercepat proses selanjutnya (Purnamasari & Ramdani, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekertaris Desa Sukaluyu yaitu bapak Herry, BUMDes Sukaluyu yang bernama Jaya Perkasa sebenarnya sudah ada sejak 2015 silam, tetapi karena peralihan masa jabatan BUMDes Jaya Perkasa baru aktif kembali

hampir satu tahun berjalan. Kemudian, perencanaan yang dilakukan saat ini terlebih saat pandemi covid-19 bahwa anggaran desa sukaluyu masih difokuskan untuk menangani covid-19 dan saat ini banyak perubahan anggaran untuk penanganan covid-19 seperti halnya BLT. Sebuah rancangan pemerintah yang dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), memberikan bantuan tunai atau bentuk lain kepada masyarakat miskin tanpa syarat dan bersyarat Tetapi meskipun anggaran desa untuk BUMDes masih belum banyak, BUMDes Sukaluyu tetap bersinergis dan optimis akan jalan dengan sukses. Peran BUMDes disini tentunya untuk ikut membantu terkait penanganan covid-19 juga ada upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi diantaranya dengan pengembangan UMKM di Desa Sukaluyu.

Sama seperti yang dikatakan direktur BUMDes permasalahan atau hambatannya memang yang paling utama mengenai permodalan, karena seperti yang dikatakan oleh Sekdes Sukaluyu bahwa anggaran masih terfokus kepada penanganan covid-19. Jadi proposal-proposal yang diajukan oleh pengurus BUMDes juga tidak bisa di setujui untuk sekarang ini.

Berdasarkan hasil observasi mengenai perencanaan peningkatan produktivitas BUMDes Desa Sukaluyu hingga ditemukan bahwa aspek-aspek peraturan atau keputusan tidak ada perencanaan yang menyimpang atau yang tidak sesuai, karena menurut Sekertaris Desa Sukaluyu BUMDes ini baru berjalan selama satu tahun sehingga tidak ada perencanaan yang tidak sesuai. Malahan perencanaan mengenai BUMDes ini sangat luar biasa karena pemerintah desa mempunyai niat ingin membuat BUMDes dalam skala besar. Justru masyarakat mengajukan permohonan-permohonan yang cukup bagus mengenai ide dan konsep usaha yang akan di jalankan. Hanya saja kendalanya saat ini hanya di penganggaran karena belum bisa memberi modal secara maksimal karena anggaran yang ada untuk menangani covid-19 di Desa Sukaluyu.

Pengorganisasian Desa Sukaluyu Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes Jaya Perkasa

Organisasi adalah proses memilih, menggabungkan, dan menetapkan berbagai tindakan yang dianggap dapat membantu mencapai tujuan. Penugasan individu untuk melaksanakan kegiatan ini dengan menggunakan variabel lingkungan fisik yang diperlukan dan mendemonstrasikan pendelegasian wewenang kepada setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Hasanah, Hidayah, & Nababan, 2022).

Akibat pekerjaan dikelompokkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing individu, maka dibutuhkan adanya pembagian kerja dalam suatu organisasi, yaitu penugasan setiap tugas dimana diharapkan pekerjaan bisa diselesaikan dengan efektif dan tidak ada *overlapping*. membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan organisasi demi mencapai tujuannya itulah yang dimaksud dengan pengorganisasian yang baik (Purnamasari & Ramdani, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Sukaluyu, bahwa untuk pengorganisasian BUMDes memiliki organisasi tersendiri seperti adanya penasehat atau bisa dibidang komisariss yang dijabat langsung oleh Kepala Desa Sukaluyu, kemudian ada pelaksana oprasional BUMDes dan adanya pengawas. Sebenarnya, karena BUMDes sudah memiliki organisasi sendiri, maka pemerintah desa tidak berhak mencampuri kapasitas yang diberikannya. Hanya saja, rencana dan tindakan yang akan dilakukan BUMDes harus dituangkan dalam proposal untuk penyaluran dana program kerja sebelum dikirm ke pihak desa untuk disetujui. Meskipun begitu pengurus BUMDes ini harus tetap sinergis dan satu kesepahaman satu visi dan misi dengan pemerintah desa.

Sedangkan, menurut hasil wawancara bersama direktur BUMDes Jaya Perkasa untuk struktur organisasi dalam kepengurusan BUMDes sudah sesuai dengan aturan yang dimana dalam hal ini struktur organisasi sudah cukup lengkap.

Dalam BUMDes Desa Sukaluyu yang bernamakan Jaya Perkasa jabatan-jabatan fungsional nya sudah terstruktur dan lengkap karena untuk menjadi pengurus BUMDes dan mengelola BUMDes ini harus sesuai dengan peraturan yang ada yang sudah tercantum di dalam SK.

Pelaksanaan Kegiatan BUMDes Jaya Perkasa di Desa Sukaluyu

Pelaksana atau dikenal sebagai "*actuating*" adalah proses pemberian kepada para bawahan dengan motivasi untuk bekerja sembari ikhlas untuk menggapai tujuan organisasi dengan cepat dan efektif. George R. Terry dalam (Hasibuan, 2010) mendefinisikan pelaksana sebagai keseluruhan upaya, pendekatan, strategi, dan metode untuk memotivasi anggota agar bekerja seefektif mungkin. *Actuating* terdiri dari komunikasi antara pihak penyelenggara dan mengkoordinasikan antara pihak terkait. Sehingga, pembinaan diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar (Susanti, Syairozi, & Yunifa, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekertaris desa bapak Herry untuk meningkatkan produktivitas BUMDes dan BUMDes tetap produktif dan bisa berjalan pemerintah desa memberikan peran, karena BUMDes ini adalah salah satu sebagai penghasil atau peningkatan

Pendapatan Asli Desa (PAD) salah satunya dari hasil usaha BUMDes yaitu produk-produk UMKM warga Desa Sukaluyu. Karena desa Sukaluyu berada di daerah kawasan industri pemerintah desa mendorong BUMDes untuk dapat memiliki suatu terobosan-terobosana penggalan-penggalan potensi usaha agar bisa bekerjasama dengan BUMDes dan BUMDes juga bisa bekerjasama dengan pihak ketiga (swasta) sehingga menghasilkan PAD yang masuk ke APBD.

Dalam hal ini masyarakat juga ikut berperan aktif, karena pengurus BUMDes sendiri juga dari masyarakat. Dan baru-baru ini Pemerintah Desa Sukaluyu membuka galeri UMKM yang dimana hasil usaha atau produk-produk UMKM masyarakat Desa Sukaluyu dapat di pasarkan di galeri tersebut dan di salurkan ke perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri. Dan dari hasil wawancara dengan direktur BUMDes produk yang ada di galeri UMKM yaitu makanan ringan, kue-kue kering dan berbagai macam kue-kue basah, sekitar 40 produk yang di pasarkan di galeri UMKM tersebut. Permasalahan yang terjadi pada UMKM di Desa Sukaluyu ini kesulitan untuk pemasaran produknya maka dari itu pemerintah desa membantu dengan cara membuka galeri UMKM Desa Sukaluyu yang bekerjasama dengan PT. Ahass.

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur BUMDes Eka Sonjaya dalam BUMDes ini sekecamatan Telukjambe Timur sudah mempunyai zona wilayah masing-masing atau zona industri untuk pendistribusian produk-produk hasil UMKM yang ada di galeri UMKM, jadi setiap desa sudah memiliki porsi nya masing-masing harus di distribusikan kemana saja.

Dengan adanya BUMDes ini secara hitungan skala besar atau skala desa pemerintah desa menurut sekretaris desa belum melakukan analisis mengenai dampak keberhasilan BUMDes terhadap perekonomian desa maupun masyarakat desa. Tetapi untuk skala kecil yang dilihat dari para pelaku UMKM desa Sukaluyu merasa mempunyai wadah dan merasa diakui oleh pemerintah desa karena mereka di bantu dalam hal pemasaran dan hal tersebut menjadi indikator manfaat dari adanya BUMDes Jaya Perkasa ini.

Pengawasan Yang Dilakukan Dalam Kegiatan BUMDes Jaya Perkasa

Proses mempraktikkan perbuatan yang telah rampung, mengkajinya dan, apabila diperlukan melakukan koreksi dengan tujuan untuk meyakinkan bahwasanya pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana awal, disebut sebagai pengawasan. Sebagai suatu proses, pengawasan mengidentifikasi apa yang patut dicapai yaitu standar, apa yang patut dijalankan yaitu pelaksanaan, sehingga pelaksanaan tersebut dapat dinilai, dan apa yang patut diperbaiki agar pelaksanaan sebanding dengan rencana. Proses pengawasan dalam hal ini terdiri dari tiga

langkah: menargetkan standar, melakukan penilaian, dan menerapkan langkah perbaikan (Purnamasari & Ramdani, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekertaris Desa Sukaluyu di dalam struktur BUMDes Jaya perkasa tentu mempunyai pengawas atau yang disebut dewan pengawas yang diawasi langsung dan ada laporan-laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentu masyarakat juga bisa ikut mengawasi program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes mengenai kinerja dan hasil yang di peroleh.

Sama seperti yang telah disampaikan oleh Sekertaris Desa Sukaluyu, direktur BUMDes Jaya Perkasa juga menyampaikan bahwa untuk proses pengawasan itu diawasi oleh BPD dan masyarakat setempat, karena masyarakat juga ikut berperan dalam BUMDes ini.

Hambatan yang dialami oleh pemerintah Desa Sukaluyu terkait BUMDes ini pertama, mengenai SDM walaupun menurut sekertaris desa sukaluyu SDM di desa sudah banyak yang mempuni tapi ketersediaan waktu mereka yang sulit karena menurutnya mereka sudah mempunyai pekerjaan utama, tetapi dengan pengabdian kepada BUMDes mereka harus meluangkan waktunya untuk mengelola BUMDes ini dengan sangat baik agar bermanfaat bagi masyarakat. Hambatan yang kedua, masalah pada permodalan, karena masih adanya pandemi covid yang belum juga usai anggaran masih terfokuskan untuk penanganan covid-19.

Dalam hal evaluasi kerja berdasarkan hasil wawancara bersama sekertaris desa sepengetahuan beliau BUMDes mempunyai jadwal evaluasi kerjanya tersendiri karena kantor dari BUMDes Jaya Perkasa tepat berada di samping kantor Desa Sukalutu sehingga beliau sering melihat diadakannya evaluasi kerja.

Untuk rencana kedepan terkait BUMDes jaya perkasa ini BUMDes Jaya Perkasa mempunyai hajat besar yaitu ingin membangun pasar bersih karena menurut sekertaris desa seperti halnya *passion* masyarakat desa sukaluyu ini berada dibidang jasa seperti berjualan sehingga produk-produk UMKM bisa dipasarkan dan dikelola oleh BUMDes di pasar bersih tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut, dalam hal perencanaan strategis Desa Sukaluyu dalam meningkatkan produktivitas BUMDes saat masa pandemi seperti sekarang ini anggaran desa lebih di fokuskan untuk penanganan covid, sehingga pemerintah desa memiliki kendala terhadap modal untuk BUMDes. Karena BUMDes baru berjalan selama kurang lebih satu tahun perencanaan tidak ada yang menyimpang. Pemerintah Desa Sukaluyu berencana ingin membuat

BUMDes ini dalam skala lebih besar. Dalam hal pengorganisasian jabatan-jabatan fungsionalnya sudah terstruktur dan lengkap karena untuk menjadi pengurus BUMDes dan mengelola BUMDes ini harus sesuai dengan peraturan yang ada yang sudah tercantum di dalam SK. Dalam hal pelaksanaan Pemerintah Desa Sukaluyu memberikan peran yang besar agar BUMDes dapat terus berjalan, Pemerintah Desa Sukaluyu juga membuka galeri UMKM untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM warga Desa Sukaluyu. Dalam hal pengawasan BUMDes diawasi oleh pengawas atau yang disebut dewan pengawas yang diawasi langsung dan ada laporan-laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentu masyarakat juga bisa ikut mengawasi program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes mengenai kinerja dan hasil yang di peroleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asvi, Z. (2017). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. *Jom fisip*.
- Hasanah, N. Y., Hidayah, R., & Nababan, R. (2022). Manajemen Pemerintahan Desa Sirnabaya Dalam Meningkatkan Produktivitas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11-15*.
- Hasibuan, M. S. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kurniawan, I., Setiawan, B., & Listiani, T. (2020). Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. *LOSARI*.
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintahan dalam Pembangunan Desa di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *POLITIKOM INDONESIA*.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kurniawan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 23-40*.
- Subaidi, M., Muchsin, S., & Khoiron. (2019). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Dusun Sumber Desa Robatak Kecamatan Robatak Kabupaten Sampang). *Jurnal Respon Publik, 24-31*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suprajo, F. H. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Susanti, I., Syairozi, M. I., & Yunifa, H. (2021). Analisis Sistem Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Bluluk. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, 704*.